Trading Kripto, Legislator Sarankan Pakai Bursa Komoditas

Tanggal	: Selasa , 29 Juni 2021
Media	: validnews.id
Halaman	: 1
Wartawan	: Khairul Kahfi
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Nusron Wahid *(Anggota Komisi VI DPR RI)*, Indrasari Wisnu Wardhana. *(Kepala Bappebti)*
Rubrik	: berita
Topik	: Kripto

BERITA

29 Juni 2021 | 17:14 WIB

Trading Kripto, Legislator Sarankan Pakai Bursa Komoditas

Pemerintah menyebutkan karakteristik komoditas aset kripto berbeda jauh dengan komoditas fisik yang jamak diperdagangkan masyarakat.

Penulis: Khairul Kahfi

Editor: Fin Harini



Ilustrasi bitcoin dengan uang lembar euro. Shutterstock/dok

JAKARTA - Legislator minta pemerintah menghitung masak-masak penyediaan bursa baru yang memperdagangkan aset kripto di dalam negeri. Alih-alih membuat bursa baru akhir tahun ini, pemerintah disarankan untuk mengoptimalkan bursa yang sudah eksis selama ini.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid menjelaskan, sejauh ini Indonesia sudah mempunyai dua bursa komoditas berjangka, yakni JFX dan ICDX. Dirinya menilai, komoditas kripto pun layak dimasukan dalam kedua bursa tersebut.

Apalagi, di tengah era integrasi yang terjadi belakangan di dunia, kemungkinan untuk integrasi dalam komoditas pun semakin kuat.

"Dulu saja kita punya dua pasar modal, ada bursa efek Jakarta dan Surabaya, lalu kemudian di-merger jadi Bursa Efek Indonesia," terangnya dalam RDP Komisi VI DPR dengan Bappebti Kemendag, Jakarta, Selasa (29/6).

Dirinya memandang, keberadaan bursa kripto oleh pemerintah bakal menghasilkan inefisiensi, sebab bakal ada tiga bursa berjangka komoditas yang jalan di Tanah Air. Itu pun salah satunya hanya memperdagangkan aset kripto saja.

Belum lagi, lanjutnya, aspek hukumnya masih diperdebatkan oleh beberapa sektor di dalam negeri. Misalnya Bank Indonesia dan Pasar Modal yang masing-masingnya mengklaim berhak untuk mengatur.

"Saya juga tidak habis pikir, bagaimana kalau tiba-tiba pemerintah berubah haluan dan menyebut bahwa kripto dilarang seperti di China, tapi sudah kadung punya bursa baru, apa bursanya dibubarkan?" ujarnya.

Sementara itu, di tengah perdebatan kripto yang digolongkan masih 'semu', pemerintah sebaiknya tidak gegabah dan buru-buru membangun bursa. Karenanya, Nusron menekankan, bursa komoditas eksisting bisa dioptimalkan untuk mengatur jual-beli komoditi kripto domestik.

Pun jika tetap berkeras membangun bursa kripto, pemerintah bakal menghadapi segudang kriteria yang panjang untuk membentuk kredibilitas bursa itu sendiri.

Pemerintah juga diminta belajar dari Turki yang perdagangan bursanya hancur lebur, pasca salah satu *exchanger* kriptonya yakni Thodex yang membawa kabur dana senilai Rp29 triliun milik masyarakat sana. Sebaliknya, kredibilitas bursa baru baru bakal menghadapi sentimen 'belum teruji'.

"Sebaiknya, Bappebti kalau bisa mengoptimalkan bursa (komoditas) yang sudah ada, dengan berbagai alasan. Yaitu kredibilitas, volatilitas regulasi dan hanya memperdagangkan satu komoitas saja. Jadi kenapa harus buat bursa baru, jika mempertaruhkan hal-hal yang sifatknya perlu dipertanyakan?" tegasnya.